

Bengkayang dan Pontianak Dinilai WDP

Penyerahan LHP BPK-RI

PONTIANAK. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Pontianak TA 2011 telah diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Kalbar.

Penyerahan dilaksanakan di ruang rapat pimpinan BPK RI. Pemkab Bengkayang maupun Pemkab Pontianak memperoleh nilai Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Penyerahan dilakukan sesuai dengan nota kesepahaman antara BPK RI dengan DPRD provinsi dan kota/kabupaten se-Kalbar. Penyerahan dihadiri Kepala BPKP Kalbar, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang, Bupati Pontianak, Inspektorat Kabupaten Bengkayang, Inspektorat Kabupaten Pontianak. Selain itu hadir juga pejabat struktural dan pemeriksa di lingkungan BPK RI Perwakilan Kalbar.

Kabupaten Bengkayang, berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK mencatat beberapa hal

yang menjadi pengecualian. Nilai persediaan per 31 Desember 2011 belum didukung dengan pencatatan yang lengkap. Nilai penyertaan modal per 31 Desember 2011 belum didukung bukti yang memadai, sebagai dasar untuk menyajikan nilai penyertaan. Nilai aset tetap, belum memisahkan nilai aset tanah dari aset jalan, jaringan dan irigasi. Kemudian belum memisahkan barang inventaris dari aset peralatan dan mesin. Belum tuntasnya penyelesaian aset dari daerah pemekaran. Terdapat realisasi belanja modal posisi 31 Desember 2011 sebesar Rp350.707.981,00 direalisasikan mendahului fisik pekerjaan dan atas keterlambatan belum dikenakan denda.

Sedangkan untuk Kabupaten Pontianak, beberapa hal yang menjadi pengecualian. Persediaan barang pakai habis belum disajikan secara memadai. Investasi permanen belum disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Aset tetap belum disajikan

secara memadai, serta belanja pegawai dianggarkan pada akun yang tidak tepat. Kemudian realisasi belanja barang yang belum dikapitalisasikan.

Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Kalbar, Adjudibyo menyampaikan, opini merupakan pernyataan profesionalisme pemeriksa mengenai kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Laporan tersebut berdasarkan empat kriteria, kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap penyajian laporan keuangan dan efektivitas penyelenggaraan SPI.

Untuk ke depannya, diharapkan agar pihak legislatif dan eksekutif daerah dapat bersama-sama saling membantu untuk mencapai opini yang lebih baik.

Ditekankan pula bahwa upaya tindak lanjut juga merupakan salah satu hal yang memengaruhi opini. Sehingga diharapkan temuan-temuan di tahun sebelumnya tak kembali terjadi di tahun berikutnya.

Menanggapi opini yang



Kepala BPK menyerahkan hasil pemeriksaan terhadap Bupati dan Dewan. SYAMSUL ARIFIN

diterima, Bupati Pontianak H. Ria Norsan menyatakan terima kasih atas kerjasama yang baik selama pemeriksaan. Di mana Pemkab Pontianak menerimanya sebagai suatu pembinaan

untuk mencapai pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Norsan berjanji untuk melakukan pembenahan aset selama tahun 2012. Empat hal yang menjadi kriteria dalam

pemeriksaan, akan menjadi perhatian pemerintah kabupaten. "Sehingga di tahun yang akan datang opini yang diperoleh dapat meningkat lebih baik," ujar Norsan. (sul)